

NASKAH PUBLIKASI

**AGENDA SETTING PROGRAM GANDENG - GENDONG KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2018**



Disusun oleh :

MARIA DEVENSOR SANTIAGO

200150520210

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

**AGENDA SETTING PROGRAM GANDENG - GENDONG KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2018**

Maria Devensor Santiago

Email : mariadevensorsantiago@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Program Gandeng-Gendong merupakan suatu program yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai suatu upaya pengentasan kemiskinan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan potensi lokal. Program ini melibatkan Kota, korporasi, kampus, komunitas, dan kampung (5K) dalam implementasinya. Fokus penelitian ini ada pada *agenda setting*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses *Agenda Setting* Program Gandeng-Gendong di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber-narasumber yang terlibat dalam proses *Agenda Setting* Program Gandeng-Gendong yang mewakili institusi mereka. Dokumentasi dilakukan kepada dokumen-dokumen yang terkait dengan Program Gandeng-Gendong seperti landasan hukum, data kemiskinan, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dianalisa dengan kedua teknik pengumpulan data tersebut yaitu : metode *Agenda Setting* Program Gandeng-Gendong, teknik menyusun prioritas masalah publik terkait Program Gandeng-Gendong, dan proses *Agenda Setting* Program Gandeng-Gendong menggunakan *Three Stream Theory*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Agenda Setting* Program Gandeng-Gendong di Kota Yogyakarta menggunakan metode *The Issue Paper/First Cut Analysis*. Sedangkan teknik penyusunan prioritas masalah publik yang digunakan

yakni *focus group discussion* dengan *stakeholder* terkait, diperkuat dengan analisis data dan diselaraskan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta. Proses *Three Stream Theory*, yaitu dari segi *Problem Stream*, diketahui pemetaan masalah dilakukan oleh BAPPEDA Kota Yogyakarta. Segi *Policy Stream*, isu yang menjadi latar belakang adalah isu kemiskinan yang kemudian dikaji lebih mendalam lalu menghasilkan Program Gandeng-Gendong. Segi *Politic Stream*, program ini merupakan salah satu perwujudan janji kampanye walikota dan wakil walikota Yogyakarta dan adanya dukungan dari partai pengusung.

Proses *Agenda Setting* Program Gandeng-Gendong Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan cukup baik. Sinergi 5K harus terus diperkuat untuk menyusun strategi guna memperkuat sektor ekonomi masyarakat miskin Kota Yogyakarta. Selain itu penggalian potensi di setiap kampung sebaiknya dilakukan lebih maksimal lagi agar implementasi program ini lebih berkembang dan bervariasi.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Agenda Setting, Program Penanggulangan Kemiskinan

A. PENDAHULUAN

Program Gandeng-Gendong merupakan suatu program pengentasan kemiskinan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan potensi lokal. Program ini melibatkan Kota, korporasi, kampus, komunitas, dan kampung (5K) dalam implementasinya. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa alasan lahirnya Program Gandeng-Gendong. Pertama, karena adanya semangat *Segoro Amarto*. Jika dibandingkan dengan DIY dan nasional angka kemiskinan di Kota Yogyakarta memang cukup rendah. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah BAPPEDA Kota Yogyakarta (Agustin, 2018) menyampaikan bahwa pada tahun 2017 DIY berada pada angka 13,02 persen, Nasional berada pada angka 10,96 persen, dan Kota Yogyakarta berada pada angka 7,64 persen. Akan tetapi dalam upaya pengentasan kemiskinan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak ingin berhenti pada angka tersebut. Semangat *Segoro Amarto* (*Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta* atau semangat gotong royong menuju kemajuan Yogyakarta) mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus melakukan upaya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Kedua, terkait perekonomian Kota Yogyakarta yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi angka ratio gini juga cukup tinggi. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah BAPPEDA Kota Yogyakarta mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2017 berada pada angka 5,24 persen. Angka tersebut selalu lebih tinggi daripada

DIY kecuali pada tahun 2017. DIY pada tahun 2017 berada pada angka 5,26 persen. Hal ini disebabkan karena di Kulon Progo ada pembangunan bandara sehingga disana pertumbuhan ekonominya cukup pesat karena ada pekerjaan fisik. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti dengan angka ratio gini yang cukup tinggi pula. Pada ada tahun 2016 Kota Yogyakarta berada pada angka 0,421 persen yang menandakan Kota Yogyakarta berada pada ketimpangan moderat (Agustin, 2018). Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gini ratio juga cukup tinggi, menandakan bahwa uang yang beredar di Kota Yogyakarta tidak sampai kepada masyarakat dengan 40% pendapatan yang rendah.

Adanya ketimpangan ekonomi disebabkan oleh empat faktor yaitu pertama, sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi. Kedua, ketimpangan kualitas pekerjaan. Orang yang tidak atau kurang terampil akan berada atau terjebak pada pekerjaan dengan produktivitas dan upah yang rendah. Hal ini menyebabkan orang tersebut sulit naik kelas sosial. Ketiga, ketimpangan pendapatan dan aset. Timpangnya pendapatan menyebabkan kekayaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat. Keempat, ketiadaan jaminan sosial (bisnis.tempo.co, 2017)

Di Kota Yogyakarta, ketimpangan cenderung disebabkan oleh faktor ketimpangan kualitas pekerjaan yaitu kurang terampil dalam suatu pekerjaan

sehingga menyebabkan orang tersebut berada pada pekerjaan dengan produktivitas dan upah yang rendah. Hal ini menyebabkan orang tersebut sulit naik kelas sosial. Kondisi ini juga berdampak pada ketidakmampuan masyarakat Kota Yogyakarta untuk turut andil dalam pergerakan ekonomi di Kota Yogyakarta sehingga pendapatan atau kekayaan hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki *hardskill* dan *softskill* yang lebih mempuni.

Ketiga, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta (Khoiri, 2019) menyatakan bahwa Program Gandeng-Gendong merupakan arah kebijakan walikota dan wakil walikota terpilih. Salah satu aspek arah kebijakannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu dirumuskan satu slogan bernama Gandeng-Gendong (semangat partisipatif dan gotong royong).

Dengan demikian lahirlah Program Gandeng-Gendong (menggandeng dan menggendong). Pemerintah kota, komunitas, kampus, korporasi, dan kampung harus bersinergi mensukseskan program ini sesuai dengan perannya masing-masing yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota tentang Program Gandeng-Gendong. 5K harus mampu menggandeng dan menggendong masyarakat yang berada pada 40 % pendapatan rendah, khususnya masyarakat miskin.

Salah satu contoh wilayah di Kota Yogyakarta yang memiliki masyarakat miskin yang cukup banyak adalah wilayah Gondokusuman dan Gondomanan. Wilayah ini memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi persentase penduduk desil 1 sampai 4 juga tinggi (Agustin, 2018). Hal ini menandakan bahwa masyarakat di wilayah tersebut tidak mampu turut andil dalam pergerakan ekonomi yang ada di Gondokuman dan Gondomanan yang didominasi dengan perkantoran. Wilayah lainnya yaitu yang berada dibantaran sungai dan sisi selatan kota Yogyakarta yang dipisahkan rel kereta api.

Program Gandeng-Gendong berpegang pada arah pembangunan Provinsi DIY tahun 2017-2022 yaitu menggunakan kebudayaan untuk mengatasi kemiskinan dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya local (bppm.jogjaprov.go.id, 2018). Program Gandeng-Gendong merupakan perwujudan dari *Segoro Amarto*, yaitu sebuah gerakan kemandirian masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai budaya lokal. Gerakan *Segoro Amarto* adalah gerakan yang diinisiasi oleh Sultan Hamengkubowono X , diluncurkan pada 24 Desember 2010 dan pertama kali direspon oleh Kota Yogyakarta (<https://www.antaraneews.com>, 2010). Gerakan *Segoro Amarto* (semangat bersama untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang berkemajuan) berlandaskan empat pilar yaitu kedisiplinan, kepedulian social, gotong

royong, dan kemandirian (bppm.jogjaprovo.go.id, 2018). Pada program Gandeng Gendong ini menjiwai pilar kemandirian dan gotong royong.

Program Gandeng Gendong diperkuat dengan 4 landasan hukum utama yaitu Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Rencana Strategis BAPPEDA Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Tentang Program Gandeng-Gendong.

Pembuatan kebijakan publik memiliki beberapa tahapan. Tahapan-tahapan atau proses pembuatan kebijakan public tersebut biasa disebut dengan *Policy Cycle*. Tahapannya adalah *Agenda Setting*, *Policy Formulation*, *Decision Making*, *Policy Implementation*, dan *Policy Evaluation*. Adanya proses panjang ini menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan publik bukan proses yang sederhana melainkan suatu proses yang banyak melibatkan berbagai macam faktor dan aktor.

Tahap dasar yang krusial dan strategis dari keseluruhan tahapan pembuatan kebijakan adalah *agenda setting*. *Agenda setting* secara sederhana dapat disebut sebagai penyusunan agenda atau pengenalan terhadap masalah-masalah. *Agenda setting* menjadi sangat krusial karena hanya setelah masalah-masalah yang ada dimasyarakat selesai difilter, didefinisikan dan diidentifikasi dengan baik, maka perencanaan kebijakan dapat dirumuskan

atau disusun (Winarno, 2012). Sehingga penelitian terhadap Program Gandeng-Gendong ini difokuskan kepada tahap *agenda setting*. Masyarakat luas perlu mengetahui lebih mendalam terkait masalah-masalah di Kota Yogyakarta yang kemudian masuk pada tahap agenda setting dan selanjutnya menghasilkan sebuah kebijakan publik yaitu berupa Program Gandeng-Gendong yang inovatif dan mengusung semangat budaya lokal tersebut.

Program Gandeng-Gendong menarik untuk diteliti karena merupakan program inovatif yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat, budaya dan potensi lokal. Kota Yogyakarta meluncurkan program ini semata-mata bukan hanya untuk percepatan pengentasan kemiskinan, akan tetapi juga untuk menguatkan kembali kearifan dan potensi lokal. Hal lain yang juga penting dari Program Gandeng-Gendong ini adalah adanya sinergi dari lima elemen dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Yogyakarta terkait Program Gandeng-Gendong ini karena, pertama, Kota Yogyakarta adalah yang pertama dalam merespon induk dari Program Gandeng Gendong yaitu Model *Segoro Amarto* dan yang pertama dalam mengimplementasikan Program Gandeng-Gendong. Kedua, Program ini selaras dengan salah satu misi Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberdayaan Masyarakat”. Ketiga, upaya penurunan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, budaya, dan potensi lokal juga semakin membuat

menarik program ini untuk diteliti, dengan kata lain secara bersamaan angka kemiskinan akan menurun dan kebudayaan masyarakat akan semakin menguat kembali.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana proses *Agenda Setting* Program Gandeng-Gendong Kota Yogyakarta tahun 2018?

C. LANDASAN TEORI

1. Three Stream Theory Dalam Agenda Setting

Salah satu ahli kebijakan yang mengembangkan model *agenda setting* adalah John Kingdon. Konsep yang dikembangkan dikenal dengan *multiple streams framework*. Dalam konsep tersebut digambarkan analisis pengambilan keputusan atau kebijakan publik, yang meliputi tiga aspek yang dikenal dengan Three Stream Theory (Jr, 2012) dalam (Aswari, 2015), yaitu :

1) Problem Stream

Problem Stream merupakan penjelasan terkait hal-hal yang menjadi perhatian banyak orang/massa yang bisa mempengaruhi hidup khalayak. Pada tahap ini terjadi pemetaan terhadap masalah-masalah yang ada baik masalah yang masih dianggap ringan sampai masalah yang

dianggap sudah darurat. Arus masalah ini merujuk pada persepsi masalah public yang membutuhkan respon dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

2) *Policy Stream*

Policy Stream merupakan arus kebijakan yang merujuk pada pemecahan masalah atau solusi yang ditawarkan oleh peneliti, pakar kebijakan, ataupun para pembuat kebijakan dalam menanggapi persoalan yang ada. Dalam arus ini akan banyak solusi yang di munculkan dan digali lebih mendalam dan selanjutnya akan di persempit untuk menentukan pilihan.

3) *Politik Stream*

Politik Stream dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya partai mayoritas yang ada di DPR/DPRD, pergantian pejabat, kampanye-kampanye yang bersifat menekan yang dilakukan oleh kelompok kepentingan, referendum publik.

Ketiga arus di atas bergerak pada konsentrasi yang berbeda. Setiap arus akan menggiring masalah publik menuju masalah kebijakan sampai akhirnya akan ada solusi yang ditetapkan di akhir sebagai *problem solving* yaitu berupa kebijakan. Dengan demikian, ketiga arus tersebut merupakan hal yang krusial dalam *agenda setting*.

2. Metode Agenda Setting

Mengidentifikasi masalah-masalah publik dalam proses *agenda setting* dapat dilakukan dengan beberapa metode (Pribadi, 2013) dalam (Aswari, 2015), yaitu :

1) *Back Of The Envelope Calculation*

Metode ini adalah metode yang menggunakan penghitungan kasar. Masalah yang ditemui di media massa baik elektronik maupun cetak, ataupun ditemui di tempat atau media lain di catat pada sepotong kertas.

2) *Quick Decision Analysis*

Metode ini adalah metode untuk menganalisa hasil evaluasi yang dilakukan secara formal dari suatu keputusan atau alternatif-alternatif yang telah ditetapkan menggunakan kriteria tertentu.

3) *Creation of valid Operational Definition*

Metode ini adalah metode untuk mengidentifikasi masalah publik dengan cara melakukan tes pembuktian atau validasi yang bertujuan untuk menentukan kuantitas dan keberadaan masalah publik.

4) *Political Analysis*

Metode ini adalah metode yang menggunakan analisis politik untuk mengidentifikasi masalah dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

5) *The Issue Paper/First Cut Analysis*

Metode ini adalah metode yang menggunakan paper, jurnal ilmiah, hasil diskusi, ataupun hasil penelitian lainnya untuk mengidentifikasi masalah.

3. Teknik Penentuan Prioritas Masalah Publik

Untuk menentukan prioritas masalah publik dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Pribadi, 2013) dalam (Aswari, 2015) :

- 1) Menyusun kuisisioner masalah-masalah publik

Tabel. 1

Penilaian Masalah Publik

No	Masalah publik	Argumentasi	Penilaian				
			1	2	3	4	5
1							
2							
3							
4							
5							

Sumber : Diktat Kuliah Formulasi Kebijakan Publik, (Pribadi, 2013)

Pada kolom masalah publik diisi dengan masalah publik yang ditemui. Selanjutnya pada kolom argumentasi diisi dengan pendapat terkait masalah publik tersebut dan dijabarkan secara mendalam. Pada kolom penilaian memberikan tanda \surd pada salah satu kolom angka. Penilaian ini akan

menunjukkan seberapa penting masalah public ini untuk kemudian masuk dalam agenda public.

2) Menentukan populasi dan sampel *stakeholder*

Populasi yang akan diambil untuk menentukan masalah-masalah publik adalah *stakeholder* pemerintahan. Sedangkan sampelnya adalah dari *stakeholder* proporsional. Masing-masing sampel akan diberi kuisisioner masalah-masalah publik yang telah dipaparkan di atas.

3) Pengelolaan data dan penyimpulan prioritas masalah

Penilaian untuk menentukan prioritas dari masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1 = tidak penting

2 = kurang penting

3 = cukup penting

4 = penting

5 = sangat penting

Tabel penilaian masalah publik akan diisi oleh masing-masing sampel. Setelah tabel penilaian tersebut selesai diisi, hasilnya akan diolah lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan permasalahan mana saja yang layak untuk menjadi prioritas dalam agenda kebijakan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Metode Agenda Setting

Berdasarkan hasil penelitian, metode *agenda setting* yang digunakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengidentifikasi masalah publik adalah metode *The Issue Paper/First Cut Analysis*. Metode *The Issue Paper/First Cut Analysis* adalah metode yang menggunakan paper, jurnal ilmiah, hasil diskusi, ataupun hasil penelitian lainnya untuk mengidentifikasi masalah. Penggunaan metode *The Issue Paper/First Cut Analysis* pada Program Gandeng-Gendong dapat dilihat dari penelusuran dokumen, hasil penelitian dan *focus group discussion* yang dilakukan saat Musrenbang.

a) Penelusuran Dokumen

Penelusuran dokumen untuk menunjang penganalisisan permasalahan di Kota Yogyakarta terlihat pada dokumen dari perangkat daerah ataupun dari pemerintah kota itu sendiri terkait evaluasi rencana strategis/program kerja tahun sebelumnya. Selain itu penelusuran dokumen ini juga terlihat pada penyediaan dokumen saat pelaksanaan Musrenbang berupa data-data kewilayahan seperti data dan informasi perencanaan pembangunan kewilayahan, tema/brand kecamatan, evaluasi dan realisasi pembangunan tahun sebelumnya, materi (inventarisasi) hasil musyawarah RW/kampung, kelompok/kelompok sektoral, dsb.

b) Hasil Penelitian

Untuk mendukung pengidentifikasian permasalahan di Kota Yogyakarta, salah satunya menggunakan hasil penelitian. Beberapa diantaranya adalah hasil kajian Pemerintah Provinsi DIY terkait kemiskinan dan ketimpangan di Yogyakarta dan hasil penelitian lainnya yang juga ada di Jurnal Jarlit BAPPEDA Kota Yogyakarta (Jurnal Jaringan Kerjasama Penelitian) yang merupakan jurnal penelitian dan pengembangan Kota Yogyakarta yang ditulis oleh para pakar dalam bidang persoalan yang dipelajari yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam mendukung pengambilan keputusan.

c) Focus Group Discussion

FGD untuk mengidentifikasi permasalahan di Kota Yogyakarta dilakukan saat Musrenbang. Musrenbang ini terdiri dari Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Pada saat Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, peserta musrenbang berdiskusi dan menyampaikan pemikiran mereka terkait permasalahan apa yang terjadi di wilayah mereka dan usulan program kegiatan yang mendukung penyelesaian masalah tersebut.

2. Penentuan Prioritas Masalah Publik

Setelah permasalahan di Kota Yogyakarta teridentifikasi, maka selanjutnya dalam penyusunan prioritas masalah publik, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan *focus group discussion* dengan stakeholder (dalam Musrenbang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022) yang diselaraskan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta 2017-2022 “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”. *Focus group discussion* dalam Musrebang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilengkapi dengan data statistik ataupun dokumen pendukung lainnya seperti hasil rekapitulasi Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan.

Pembahasan prioritas masalah publik yang dibahas dalam Musrebang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 bertajuk “Potensi dan Tantangan Kota Yogyakarta”. Musrenbang RPJMD ini bertujuan untuk mendapatkan masukan para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penajaman dan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Musrenbang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tersebut maka didapatkan hasil bahwa ada beberapa permasalahan publik di Kota Yogyakarta yaitu :

- 1) Adanya kesenjangan ekonomi
- 2) Kemampuan bersaing pelaku perdagangan kecil masih relative rendah dibandingkan dengan pelaku perdagangan besar
- 3) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif
- 4) Perlu adanya peningkatan potensi pariwisata
- 5) Belum optimalnya pengawasan perizinan investasi
- 6) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ada
- 7) Rendahnya sarana dan prasarana pendukung olahraga dan kepemudaan
- 8) Permasalahan ketertiban dan keamanan
- 9) Tingginya minat untuk bersekolah di Kota Yogyakarta
- 10) Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kesehatan
- 11) Belum optimalnya upaya peningkatan keluarga sejahtera
- 12) Belum adanya peningkatann jumlah taman dan RTH
- 13) Peningkatan pemanfaatan lahan untuk jasa dan perusahaan
- 14) Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah
- 15) Rendahnya kinerja pelayanan air minum/bersih
- 16) Masih ada pencemaran air sungai
- 17) Permasalahan transportasi perkotaan

- 18) Pelayanan terkait kebencanaan belum optimal
- 19) Masalah tertib administrasi kependudukan dan kepadatan penduduk
- 20) Tata pemerintahan yang baik dan bersih yang belum optimal
- 21) Pemenuhan kebutuhan produk hukum belum optimal
- 22) Masalah kesatuan bangsa dan politik
- 23) Penataan aparatur pemerintah daerah belum optimal
- 24) Pengelolaan informasi yang belum optimal

Salah satu prioritas masalah publik yang masuk dalam agenda pembangunan RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan di anggap isu strategis karena menyangkut hal dasar dalam kehidupan masyarakat yaitu sandang, pangan, dan papan. Pemerintah sulit untuk masuk ke pembangunan selanjutnya sebelum hal-hal dasar tersebut terpenuhi. Ketika orang sudah terpenuhi segala kebutuhan hidupnya maka kemampuan untuk berkembangnya juga akan lebih baik dan akan berpengaruh ke sektor yang lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, kemiskinan dan adanya kesenjangan ekonomi di Kota Yogyakarta menjadi agenda publik karena masalah ini menjadi masalah yang mencakup banyak orang dan juga berdampak luas pada sektor-sektor lainnya jika tidak segera diselesaikan.

3. Three Stream Theory

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *Agenda Setting* Program Gandeng-Gendong telah menggunakan aspek-aspek *Three Stream Theory* , yaitu sebagai berikut :

1. *Problem Stream*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemetaan masalah di Kota Yogyakarta dilakukan oleh BAPPEDA Kota Yogyakarta. Pemetaan masalah dilakukan dengan cara Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang Kota Yogyakarta membawa semangat *Segoro Amarto* (*Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta* atau semangat gotong royong menuju kemajuan Yogyakarta). Salah satu permasalahan publik yang ditemukan dalam musrenbang Kota Yogyakarta adalah kemiskinan. Berdasarkan pengidentifikasi masalah publik, terdapat 24 permasalahan publik yang teridentifikasi. Masalah kemiskinan ini masuk dalam salah satu 24 permasalahan publik tersebut dan juga masuk dalam prioritas pembangunan dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2020.

Dua hal penting yang disoroti Pemerintah Kota Yogyakarta terkait kemiskinan ini adalah kemiskinan merupakan isu strategis dan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang tinggi akan tetapi angka ratio gini juga cukup tinggi (kesenjangan ekonomi).

2. *Policy Stream*

Pemetaan permasalahan di Kota Yogyakarta telah dilakukan dan ditentukan prioritasnya. Salah satu permasalahan yang harus segera dibuatkan alternatif kebijakannya adalah kemiskinan. Untuk merumuskan alternatif kebijakan guna menyelesaikan masalah kemiskinan di Kota Yogyakarta, pemerintah kota menggunakan beberapa input-input pendukung dalam perumusannya. Input-input dalam perumusan alternatif kebijakan yang akan dibuat ini adalah :

a. Regulasi Pengentasan Kemiskinan

- Arah Pembangunan Provinsi DIY (bappeda.jogjaprovo.go.id, 2017), yaitu: strategi kebudayaan diletakkan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, penguatan ekonomi berbasis sumberdaya lokal, keunikan teritori)
- Amanat Perda No 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta
Perda No 23 Tahun 2009 yang mendukung lahirnya Program Gandeng-Gendong Kota Yogyakarta adalah : BAB II Pasal 2 menjelaskan bahwa asas penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta adalah pemberdayaan dan partisipatif
- Model Segoro Amarto

Model Segoro Amarto memiliki 4 pilar yaitu kebersamaan, kepedulian, kemandirian, dan kedisiplinan. Dalam implementasinya Segoro Amarto memiliki 3 prinsip yaitu (bppm.jogjaprovo.go.id, 2018) : Sinergi, Kerelawanan, Keteladanan.

- Arah Kebijakan Kota Yogyakarta 2017-2022

Arah kebijakan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat diantaranya (hukum.jogjakota.go.id, 2017) :

- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia
- 2) Berkembangnya kemitraan sosial dalam semangat gotong royong yang akan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi berbagai kerawanan sosial
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat

b. Potensi Ekonomi Lokal

Kota Yogyakarta memiliki banyak potensi ekonomi, diantaranya (jogjakota.bps.go.id, 2017) :

- 1) Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak 417.744 jiwa, berada pada urutan keempat di DIY dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 12.854 orang per km². Tentunya

Kota Yogyakarta tidak akan ada kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja. Dukungan peningkatan kualitas SDM dalam hal pendidikan dan keterampilan akan berdampak pada peningkatan daya saing dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

2) Usaha Mikro Kecil menjadi Sumber Mata Pencaharian Utama

Usaha Mikro Kecil (UMK) memang menjadi andalan penduduk Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil SE2016, jumlah tenaga kerja UMK non pertanian di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 145.651 orang (67,16 persen). UMK tidak hanya merupakan tumpuan mata pencaharian penduduk Kota Yogyakarta tetapi juga sumber aktivitas yang memperkuat sendi perekonomian

3) Potensi Lokal Lainnya

Kota Yogyakarta memiliki banyak potensi lokal yang perlu dikembangkan lagi seperti potensi kesenian, kuliner, dsb yang disetiap wilayah nya berbeda-beda.

c. Hasil Rekapitulasi Musrenbang Kelurahan

Untuk menggali permasalahan dan potensi yang ada di Kota Yogyakarta, pemerintah kota melakukan Musrenbang. Hasil rekapitulasi dari Musrenbang ini, akan menjadi bahan dalam Musrenbang pemerintah kota dalam perumusan perencanaan pembangunan 2017-

2022. Berdasarkan hasil rekapitulasi musrenbang kelurahan yang telah dijelaskan dalam *problem stream* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat minim keterampilan dalam pekerjaan sehingga menyulitkan mereka untuk ikut andil dalam pergerakan perekonomian Kota Yogyakarta yang didominasi oleh perkantoran, jasa, dan industri.

d. Hasil Analisis Data Pemerintah Kota Kota Yogyakarta

Analisis Pemerintah Kota Yogyakarta terkait Indek Gini. Berikut ini merupakan indeks gini Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 :

Tabel. 2

Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Indeks Gini	0,3603	0,4366	0,3959	0,4431	0,4214	4,38
Kriteria Ketimpangan	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat	

Sumber : Perda No 11 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kota Yogyakarta (<https://hukum.jogjakota.go.id>, 2017)

Berdasarkan nilai Indeks Gini, pada tahun 2012-2016 Kota Yogyakarta memiliki kriteria ketimpangan sedang (moderat). Pada tahun 2012-2016 terlihat adanya peningkatan yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,38 persen per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan indeks gini Kota Yogyakarta sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat juga semakin besar. Peningkatan pendapatan

masyarakat berpenghasilan 20 persen teratas tidak sebanding dengan masyarakat dengan penghasilan 40 persen terbawah.

Langkah Pemerintah Kota Yogyakarta selanjutnya adalah merumuskan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini berdasarkan input-input yang telah ada. Dalam pemetaan masalah ditemukan bahwa angka kemiskinan di Kota Yogyakarta sulit diturunkan tanpa adanya sinergi dari semua lapisan masyarakat. Selain itu beberapa input yang masuk diantaranya hasil musrenbang menunjukkan bahwa perlu adanya pemberdayaan masyarakat agar mampu terjun ke dalam dalam sektor tersier (bidang jasa dan industri). Input selanjutnya adalah regulasi dan potensi lokal. Maka, alternatif kebijakan yang diinisiasi adalah pemberdayaan masyarakat dan penguatan kebudayaan (gotong royong) serta potensi lokal. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan dapat berjalan dengan maksimal.

Pemberdayaan masyarakat dianggap efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat menekankan kepada peningkatan kemandirian, kemampuan, dan kekuatan internal masyarakat untuk mengelola sumber daya baik materi maupun non materi.

Hasil pembahasan mendapatkan bahwa alternatif berupa pemberdayaan masyarakat berbasis kebudayaan serta potensi lokal adalah

Program Gandeng-Gendong. Selanjutnya program ini juga dibuatkan Peraturan Walikota Program Gandeng-Gendong sebagai landasan hukumnya. Dengan adanya perwal ini maka sudah ada pedoman pelaksanaan untuk kemudian bisa diimplementasikan di Kota Yogyakarta sebagai program pengentasan kemiskinan.

Visi Program Gandeng-Gendong adalah bersama bersama memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan misionya yaitu, menanamkan nilai-nilai etika dan budaya gotong-royong, mengembangkan gerakan gandeng-gendong, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, khususnya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Implementasi Program Gandeng-Gedong Kota Yogyakarta melibatkan 5K (kota, kampus, korporasi, komunitas, kampung). Setiap elemen yang tergabung dalam 5K ini memiliki tugasnya masing-masing. Agar ada sinergitas antar setiap elemen, maka pemerintah membentuk Forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Kota Yogyakarta sebagai keberlanjutan Program Gandeng-Gendong. Dibentuknya forum ini akan lebih memperjelas tupoksi setiap elemen dalam bertindak. Jika tupoksi sudah jelas maka setiap elemen tidak berjalan sendiri-sendiri akan tetapi saling bersinergi.

Setelah konsep Program Gandeng-Gendong ini selesai di proses, maka konsep ini diluncurkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada April 2018. Program Gandeng-Gendong mendapat dukungan dari masyarakat, *stakeholder*, maupun DPRD Kota Yogyakarta karena urgensinya terkait dengan pengentasan kemiskinan dan penguatan kebudayaan local dengan semangat partisipatif dan gotong royong. Sasaran dari Program Gandeng-Gendong adalah masyarakat miskin terutama masyarakat yang masuk dalam data BDT dan KSJPS. Berikut data masyarakat Kota Yogyakarta yang masuk data BDT dan KSJPS :

Tabel. 3
Data BDT dan KSJPS Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Data BDT Mei 2018	Data KSJPS November 2017	Irisan Data
1	Mantrijeron	11.562	4.130	2.714
2	Kraton	4.835	4.019	1.941
3	Mergangsan	8.960	6.801	3.566
4	Umbulharjo	16.057	6.243	3.470
5	Kotagede	9.254	2.069	1.409
6	Gondokusuman	7.272	5.561	2.445
7	Danurejan	5.622	3.980	2.100
8	Pakualaman	1.674	1.575	696
9	Gondomanan	5.197	2.072	1.218
10	Ngampilan	5.318	1.561	921
11	Wirobrajan	9.593	4.648	2.856
12	Gedong Tengen	7.022	2.095	1.289
13	Jetis	8.959	4.863	2.803
14	Tegalrejo	13.784	5.477	2.179
Total		115.109	55.094	30.607

Sumber : BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2018

Berdasarkan table di atas, ada 30.607 jiwa yang masuk dalam data BDT dan KSJPS, maka 30.607 jiwa inilah yang menjadi sasaran utama Program Gandeng-Gendong.

3. *Politic Stream*

Politic Stream atau arus politik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya partai mayoritas yang ada di DPR/DPRD, janji-janji kampanye, pergantian pejabat, referendum publik. Arus Politik yang terjadi pada Program Gandeng-Gendong Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu janji kampanye dan kepentingan partai pengusung. Berikut penjabarannya :

1. Janji Kampanye

Pasangan nomor urut dua, Haryadi Suyuti-Haroe Poerwadi yang terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta pada tahun 2017 lalu, pada saat kampanye mengusung visi “ Menjadikan Kota Yogyakarta yang makmur, maju, berbudaya, religius, toleran, sebagai kota yang nyaman huni, kota pendidikan, dan kota pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan” (koran-sindo.com, 2017). Program Gandeng-Gendong ini merupakan salah satu upaya perwujudan dari poin kampanye menjadikan Kota Yogyakarta yang makmur, berbudaya, berdaya saing kuat untuk

keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan. Hal ini terlihat dari konsep Program Gandeng-Gendong yaitu mengentaskan kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat miskin dengan menggunakan budaya (gotongroyong) dan pengoptimalan potensi lokal.

2. Kepentingan Partai Pengusung

Haryadi Suyuti-Haroe Poerwadi yang terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta pada tahun 2017 lalu, diusung oleh koalisi Partai Golkar, PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra (koran-sindo.com, 2017). Visi dan misi calon ini tentu didukung oleh partai pengusung. Adanya dukungan partai politik terhadap kebijakan kepala daerah tidak lepas dari tujuan partai politik itu sendiri, diantaranya untuk memperoleh kekuasaan atau jabatan-jabatan politik, mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, merebut dukungan rakyat, memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, serta negara, dan sebagainya.

Selain itu Program Gandeng-Gendong ini juga di dukung oleh fraksi-fraksi lain di DPRD Kota Yogyakarta dan *stakeholder* yang terkait lainnya. Semua fraksi yang ada di DPRD Kota Yogyakarta menyepakati bahwa program ini karena merupakan program positif, sesuai dengan penjabaran visi-dan misi walikota terpilih, realible dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan merupakan turunan dari RPJMD yang sudah disahkan

menjadi perda maka merupakan sebuah konsensus politik bersama antara eksekutif dan legislative. Urgensi dan konsep dari program ini rasional dan inovatif. Selain itu Program Gandeng-Gendong juga mendapat dukungan payung hukum.

Leading sector Program Gandeng-Gendong adalah BAPPEDA Kota Yogyakarta sedangkan di DPRD Kota Yogyakarta, program ini dibawah pengawasan Komisi B. Komisi B DPRD Kota Yogyakarta memiliki bidang tugas perekonomian dan keuangan. Bidang/sub bidangnya meliputi kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pertanian, penanaman modal, pariwisata, administrasi keuangan daerah.

Program Gandeng-gendong sebagai salah satu upaya pengetasan kemiskinan di Kota Yogyakarta mendapat pengalokasian dana di APBD Kota Yogyakarta. Anggaran tersebut, belum ditambah anggaran dari Pemerintah DIY dan pemerintah pusat. Agar lebih mengefektifkan penggunaan anggaran sehingga tepat sasaran, program harus diintegrasikan di setiap OPD (Tribunjogja.com, 2017)

Pengawasan Program Gandeng-Gendong ini salah satunya juga dilakukan oleh DPRD Kota Yogyakarta dengan melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali memanggil dinas-dinas yang terkait implementasi

kebijakan pengentasan kemiskinan, salah satunya termasuk implementasi program ini (Khoiri, 2019).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang Agenda Setting Program Gandeng-gendong Kota Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses Agenda Setting Program Gandeng-Gendong Kota Yogyakarta berjalan dengan baik sesuai dengan alur pelaksanaannya, yaitu dimulai dari pengidentifikasian permasalahan di Kota Yogyakarta, pemerioritasan masalah publik, kemudian pembuatan kebijakan. Program ini menggunakan metode *The Issue/First Cut Analysis*. Penggunaan metode *The Issue Paper/First Cut Analysis* pada Program Gandeng-Gendong dapat dilihat dari penelusuran dokumen, *focus group discussion*, dan jurnal hasil penelitian.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan teknik *focus group discussion* yang diselaraskan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil walikota untuk menentukan prioritas masalah publik. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penajaman dan penyempurnaan isu strategis dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
3. Proses *Agenda Setting* Program Gandeng-Gendong Kota Yogyakarta telah memenuhi aspek-aspek dalam *Three Stream Theory* yang dikemukakan oleh John

Kingdon. Aspek *Problem stream* terlihat dari pemetaan masalah yang terjadi dalam proses *agenda setting* program gandeng-gendong dilakukan oleh BAPPEDA Kota Yogyakarta. BAPPEDA mengadakan musrenbang untuk menggali permasalahan dan potensi yang ada di Kota Yogyakarta. Aspek *Policy stream* terlihat dari issue yang menjadi latar belakang adalah isu kemiskinan. Isu ini kemudian dikaji bersama oleh pemerintah Kota dan stakeholder. Berdasarkan hasil kajian tersebut kemudian menghasilkan alternatif kebijakan berupa program gandeeg-gendong. Aspek *Politic stream* terlihat dari : Program ini merupakan salah satu perwujudan janji kampanye. Selain itu juga adanya dukungan oleh partai pengusung walikota dan wakil walikota Yogyakarta. Penganggaran untuk penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta juga sudah dianggarkan di APBD Kota Yogyakarta. Selain itu agar Program Gandeng-Gendong memiliki payung hukum maka dibuatkan peraturan walikota tentang Program Gandeng-Gendong.

Beberapa rekomendasi, yaitu :

1. Sinergi 5K harus terus diperkuat untuk menyusun strategi guna memperkuat sector ekonomi masyarakat miskin Kota Yogyakarta agar sasaran penerima manfaat dari Program Gandeng-Gendong lebih memiliki rasa tanggungjawab bersama dalam mensukseskan program ini.
2. Sebaiknya BAPPEDA sebagai *leading sector* Program Gandeng-Gendong ini lebih memasif kan lagi sosialisasi terkait program pengentasan ini agar

sasaran penerima manfaat lebih memiliki rasa tanggungjawab bersama dalam mensukseskan program ini.

3. Penggalian potensi di setiap kampung sebaiknya dilakukan lebih maksimal lagi, agar implementasi Program Gandeng-Gendong lebih berkembang dan bervariasi, bukan hanya dalam hal kesenian maupun kuliner

F. REFERENSI

Sumber Buku :

Anderson, J. (1975). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Dunn, W. (1999). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora .

Jones, C. O. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey: Cole Publishing Company.

Pribadi, U. (2013). *Formulasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rushefky, M. (1990). *Public Policy in The United States*. Pacific Grove: Cole Publishing Company.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, D. 2006. *Perencanaan dan Evaluasi* . Surabaya: Airlangga University Press

Surachman, W. (1975). *Suatu Pengantar Dasar dan Teknik Research*. Bandung: CV. Tarsito.

Tague, Nancy R. 2004. *The Quality Toolbox, Second Edition* . ASQ Quality Press

Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik "Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: C A P S.

Sumber Jurnal :

Afif, M. A. (2018). Agenda Setting Program Jemput Bola Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kependudukan Masyarakat Tahun 2014 - 2015 (Studi Kasus Pengurusan Pelayanan Akta Kelahiran). *Skripsi*.

Aswari, T. A. (2015). Agenda Setting Program One Village One Product (Ovop) Kabupaten Bantul. *Journal of Governance And Public Policy*.

Choirunisa, N. (2018). Analisis Agenda Setting Dalam Proses Perumusan Program Desa Layak Anak (Studi di Desa Panggungrejo, Kabupaten Pringsewu). *Skripsi*.

Darmawan, E. (2015). Agenda Setting Dalam Perencanaan Pembangunan Perbatasan di Kepulauan Riau Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*.

- Delbecq A. L. and VandeVen A. H, (1971). A Group Process Model for Problem Identification and Program Planning. *Journal Of Applied Behavioral Science VII (July/August, 1971)*
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics*.
- Jr, P. J. (2012). John Kingdon's "Three Stream" Theory and the Antiterrorism and Effective Death Act of 1996. *Journal of*, 25-26.
- Kolbinur, I. (2017). Analisis Kebijakan Pelestarian Damar Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Terhadap Agenda Setting Damar Sebagai Usaha Perlindungan Dan Peningkatan Kesejahteraan Petani Damar). *Skripsi*.
- Madani, M. (2011). Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar. *Otoritas*.
- Maman, D. S. (2016). Agenda Setting dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Mardana, I. B. (2014). Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dengan The Sustainable Livelihood Approach Berbasis Budaya Lokal Di Daerah Lahan Kering Nusa Penida Klungkung-Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia . *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 213.
- Santoso, A. D. (2014). Disabilitas Dan Bencana (Studi Tentang Agenda Setting Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Klaten , Jawa Tengah, Indonesia). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Santoso, D. (2017). Penanganan Transient Poverty : Diskursus Agenda-Setting Dalam Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. *Disertasi*.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK*.
- Yasintha, P. N. (2017). Peran Media Dalam Agenda Setting Dalam Permasalahan Transportasi Di Jakarta. *Naskah Publikasi*.

Sumber Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No 4 Tahun 2007

Peraturan Walikota Tentang Program Gandeng-Gendong.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta No 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib

Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta

Sumber Online :

Pribadi, U. (2013). *Formulasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<http://bisnis.tempo.co>. (2017). *Ketimpangan Ekonomi di Indonesia, Menppenas: Ada Empat Penyebab*. Jakarta: <http://bisnis.tempo.co>. diakses pada 20 Maret 2019

<https://bppm.jogjaprov.go.id>. (2018). *Buku Segoro Amarto*. Yogyakarta: bppm.jogjaprov.go.id diakses pada 29 September 2018

<http://jogja.tribunnews.com>. (2018). *Pemkot Yogyakarta Luncurkan Program Gandeng Gendong*. Kota Yogyakarta: <http://jogja.tribunnews.com> diakses pada 29 September 2018

<https://hukum.jogjakota.go.id>. (2017). *RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022*. Yogyakarta:<https://www.jogjakota.go.id> diakses pada 27 September 2018

<https://www.antaraneews.com>. (2010). *Sultan Luncurkan "Segoro Amarto"*. Yogyakarta: <https://www.antaraneews.com> diakses pada 3 Oktober 2018

<https://Tribunjogja.com>. (2017). *Pengentasan Kemiskinan Akan terintegrasi di Kota Yogya*. Yogyakarta: Tribunjogja.com diakses pada 5 Oktober 2018

<https://republika.co.id>. (2017). *Yogyakarta Optimalkan Ekonomi Kreatif*. Yogyakarta: [Republika.co.id](https://republika.co.id) diakses pada 7 Januari 2019

<https://krjogja.com> (2017). *Duh..Jogja Terburuk Belanja Masyarakatnya*. Yogyakarta:krjogja.com diakses pada 4 Februari 2019

Sumber Wawancara :

Agustina. (2018, November 30). Program Gandeng-Gendong. (M. D. Santiago, Interviewer)

Budianto, D. (2018, Desember 28). Program Gandeng-Gendong. (M. D. Santiago, Interviewer)

Khoiri, N. (2019, Januari 2). Program Gandeng-Gendong. (M. D. Santiago, Interviewer)

